

IMPLEMENTASI APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI) DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI UNIT PELAKSANA TEKNIS JAKARTA SMART CITY

Dinda Zubaida

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
dinda.19050@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Dalam rangka mengatasi permasalahan kota akibat urbanisasi yang terus terjadi dan tidak terkontrol yang meliputi masalah keamanan, lingkungan, kesehatan, energi, pelayanan publik, serta permasalahan kota lainnya, maka pemerintah kota Jakarta mulai meluncurkan program aplikasi Jakarta Kini (JAKI) melalui Unit Pelaksana Teknis Jakarta *Smart City* yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 144 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Program Aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yaitu program yang mengintegrasikan fitur layanan publik di Jakarta dan juga merupakan pelayanan terpadu satu pintu yang dapat memberikan manfaat kepada warganya yang dapat diakses secara *online* melalui aplikasi JAKI di *smartphone*. Tujuan adanya program aplikasi JAKI memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar Jakarta dan mempermudah pengaksesan pelayanan publik di Jakarta karena telah terintegrasi melalui aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Metode pengumpulan data yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dianalisis melalui teknik analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Kata Kunci: Implementasi, Smart City, Aplikasi JAKI.

Abstract

In order to overcome city problems due to urbanization that continues to occur and is not controlled which includes issues of security, environment, health, energy, public services, and other city problems, the Jakarta city government has begun to launch the Jakarta Kini application program (JAKI) through the Jakarta Technical Implementation Unit. Smart City which is regulated in DKI Jakarta Governor Regulation No. 144 of 2019 concerning the Organization and Work Procedure of Communication, Informatics and Statistics Office of DKI Jakarta Province. The Jakarta Kini Application Program (JAKI), which is a program that integrates public service features in Jakarta and is also a one-stop integrated service that can provide benefits to its citizens which can be accessed online through the JAKI application on smartphones. The aim of the JAKI application program is to make it easier for the public to get information about Jakarta and to make it easier to access public services in Jakarta because it has been integrated through the application. This type of research uses a qualitative and descriptive approach. The focus of this research is the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, implementor dispositions, inter-organizational communication, and social, political, and economic conditions. Methods of data collection using interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Keywords: Implementation, Smart City, JAKI Application.

PENDAHULUAN

Populasi dunia yang bertambah dan urbanisasi yang meningkat menyebabkan kepadatan di daerah perkotaan yang signifikan di penjuru dunia. Kota merupakan suatu tempat dengan pemukiman dengan relatif besar, padat, dan penuh dengan berbagai jenis orang. Menurut Widyaningsih (2013) menyatakan bahwa kota harus siap menghadapi isu-isu seperti kelangkaan sumber daya, munculnya permukiman kumuh, masalah limbah dan polusi, kemacetan lalu lintas, dan lainnya seiring meningkatnya kepadatan penduduk, penurunan kualitas lingkungan, termasuk permasalahan fisik kota yang ditimbulkan. Di tempat tersebut terjadi kumpulan keanekaragaman dari berbagai banyak hal. Kota memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Peningkatan keberlanjutan pada lingkungan sosial dan ekonomi di suatu kota perlu dilakukan melalui konsep kota cerdas. Hal tersebut menjadi suatu tantangan dalam pengelolaan kota. Wilayah kota yang luas atau beragam secara demografis berusaha memberikan layanan kepada semua unsur masyarakat. Oleh karena itu, kota perlu merancang dan menerapkan layanan publik digital yang inovatif. Dalam hal ini yaitu mengarah pada layanan publik secara digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan utilitas dan kualitas dari layanan digital tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia penggunaan teknologi mendukung penyelenggaraan pemerintah dalam memperbaiki kualitas administrasi, pelayanan, serta interaksi kepada masyarakat atau dikenal dengan *e-government* (Ekandana dan Tauran, 2022). Hal ini untuk memastikan bahwa layanan publik berbasis teknologi dapat membantu menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam hal ini, kota-kota di Indonesia menerapkan strategi *Smart City* untuk menyediakan layanan publik kepada penduduknya.

Smart City menjadi salah satu langkah yang diterapkan dalam pengembangan kota berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. *Smart City* didefinisikan yakni salah satu rancangan konsep untuk membantu masyarakat, khususnya sejauh menawarkan jenis bantuan publik dengan pengelolaan sumber daya yang ada dengan bijak, efektif dan efisien. *Smart City* merupakan konsep kota cerdas atau kota pintar yang inovatif dalam rangka memberikan informasi yang tepat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Menurut Nurman (2013) menyatakan bahwa dasar dari *smart city* adalah terdiri dari tiga hal, yaitu faktor manusia, faktor organisasi, dan faktor teknologi. *Smart City* didasari sebagai usaha penyelesaian masalah yang dialami suatu kota, sehingga diantisipasi kota menjadi layak huni, harmonis, sejahtera untuk masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan dan mendukung masyarakat yang terdidik, cerdas, dan bermoral, kota pintar terintegrasi dengan semua aspek kehidupan.

Caragliu, Andrea, dkk. (Schaffers, 2010) mendefinisikan bahwa *Smart City* yakni kota yang

mampu menggunakan sumber daya manusia, media sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijak melalui pemerintahan berbasis masyarakat. Selanjutnya, menurut Cohen (2014) mendefinisikan bahwa *Smart City* yakni sebuah kota pintar dan pemanfaatan sumberdaya secara cerdas dan produktif, menyisihkan uang dan tenaga, lebih mengembangkan administrasi dan kepuasan pribadi, serta mengurangi kesan alami yang menjunjung tinggi kemajuan dan ekonomi hijau.

Sementara menurut Giffinger et al. (2007) melaporkan bahwa *Smart City* didefinisikan dalam enam domain: *Smart Governance, Economy, Living, Environment, People, dan Mobility*.

SMART ECONOMY (Competitiveness) <ul style="list-style-type: none"> • Innovative spirit • Entrepreneurship • Economic image & trademarks • Productivity • Flexibility of labour market • International embeddedness • Ability to transform 	SMART PEOPLE (Social and Human Capital) <ul style="list-style-type: none"> • Level of qualification • Affinity to life long learning • Social and ethnic plurality • Flexibility • Creativity • Cosmopolitanism/Open-mindedness • Participation in public life
SMART GOVERNANCE (Participation) <ul style="list-style-type: none"> • Participation in decision-making • Public and social services • Transparent governance • Political strategies & perspectives 	SMART MOBILITY (Transport and ICT) <ul style="list-style-type: none"> • Local accessibility • (Inter-)national accessibility • Availability of ICT-infrastructure • Sustainable, innovative and safe transport systems
SMART ENVIRONMENT (Natural resources) <ul style="list-style-type: none"> • Attractivity of natural conditions • Pollution • Environmental protection • Sustainable resource management 	SMART LIVING (Quality of life) <ul style="list-style-type: none"> • Cultural facilities • Health conditions • Individual safety • Housing quality • Education facilities • Touristic attractivity • Social cohesion

Gambar 1. Karakteristik dan Faktor dari Smart City
(Sumber: Giffinger et al. 2007)

Dijelaskan bahwa karakteristik utama *Smart City* oleh Giffinger et al. (2007), yaitu:

- Smart Governance*, terkait dengan aspek kebijakan kota, seperti partisipasi, *e-governance* dan transparansi pemerintah
- Smart Economy*, meminta pembangunan perkotaan yang sebagian besar dipimpin oleh bisnis daripada oleh pemerintah
- Smart Living*, secara eksplisit aspek sosial kota pintar berkaitan dengan kualitas hidup. Termasuk pada aspek budaya, kesehatan, keselamatan, pariwisata, pendidikan, dan hubungan sosial.
- Smart Environment*, indikator ini terjadi dalam proses yang berbeda dan dilihat dari keberlanjutan ekologis yang bergantung apada kondisi kota tersebut
- Smart People*, berkaitan dengan sumber daya manusia dan dilihat dari karakteristik masyarakat seperti usia, pendidikan, kreativitas, dan pikiran yang terbuka.
- Smart Mobility*, berkaitan dengan sistem transportasi perkotaan yang baik bagi lingkungan.

Jakarta yakni salah satu kota terbesar di Indonesia dan ibu kota provinsi. Warga dari daerah lain kerap berkunjung ke DKI Jakarta sehingga menimbulkan

urbanisasi. Urbanisasi kota Jakarta mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk yang signifikan. Angka tersebut meningkat selama tiga tahun terakhir, dari 2019 hingga 2021, menurut informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dalam data tersebut tercatat bahwa penduduk yang terdapat di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 10.609,68 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 15.978 jiwa/km².

Kepadatan tersebut menimbulkan munculnya berbagai permasalahan kota akibat urbanisasi yang terus terjadi dan tidak terkontrol. Masalah yang dihadapi tersebut meliputi masalah keamanan, lingkungan, kesehatan, energi, pelayanan publik, serta permasalahan kota lainnya. Elemen-elemen dari isu-isu tersebut menuntut pemikiran kritis yang menarik di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut menjadi tantangan untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta membuat konsepsi Jakarta yang lebih modern.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah regulasi yakni mengusung kerangka kota yang cerdas melalui gagasan Jakarta *Smart City*. Banica et al. (2020) memberikan pernyataan bahwa secara keseluruhan *Smart City* bergantung pada jumlah demografis kota, daerah perkotaan yang besar cenderung memiliki inisiatif tinggi dibandingkan dengan kota lain. Sehingga tujuan dari konsep tersebut adalah agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menyeluruh.

Pemerintah diharapkan dapat menerima asumsi publik dan tantangan di seluruh dunia yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan, khususnya di bidang teknologi (Megawati dkk., 2022). Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan suatu Kebijakan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. Hal ini agar dapat ditemukan solusi yang tepat secara cepat dan efektif terhadap permasalahan yang muncul.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi di era transformasi digital untuk pelayanan publik yang lebih baik dengan kebijakan ini. Pemerintah berusaha menunjukkan bahwa mereka mampu mengidentifikasi bagaimana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Melalui keterlibatan masyarakat, hal tersebut menambah nilai dalam inovasi pelayanan publik. Pemerintah perlu untuk memastikan kapasitas inovasi yang memadai termasuk dalam keterampilan teknis, kebijakan, manajemen dalam menerapkan kebijakan, struktur tata kelola, dan aplikasi yang menyediakan layanan kota yang lebih baik.

Jakarta *Smart City* dikembangkan dengan enam indikator, yang meliputi: *Smart Governance*; *Smart Economy*; *Smart Environment*; *Smart People*; *Smart Mobility*; dan *Smart Living*. Indikator tersebut diadopsi dari konsep *Smart City* yang mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Menurut Fanida, et al. (2021) menyatakan bahwa penerapan pemerintahan elektronik di lingkungan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik dengan

pemanfaatan kemajuan dalam teknologi informasi. Dengan ini, Jakarta *Smart City* menyediakan produk aplikasi dan layanan yang terintegrasi, yaitu aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Sehingga pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan aplikasi JAKI untuk peningkatan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Aplikasi Jakarta Kini terbentuk sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di provinsi DKI Jakarta. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) menjadi bagian yang sangat penting karena membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, membantu melawan korupsi, dan meningkatkan transparansi (Sofiana, 2023).

Akan tetapi, masih terdapat warga yang belum mengenal terkait aplikasi JAKI. Sehingga masih terdapat masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh informasi, mengakses aplikasi atau web, dan memberi laporan terkait dengan yang terjadi di sekitar wilayah Jakarta. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi (2022) menyatakan bahwa pada indikator keterlibatan masyarakat masih banyak masyarakat yang belum tahu JAKI sebagai media pengaduan kepada pemerintah.

Berangkat pada latar belakang yang telah dipaparkan, alasan penulis dalam memilih judul ini karena masih terdapat masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui mengenai produk Jakarta *Smart City* yaitu aplikasi Jakarta Kini (JAKI) terutama pada masyarakat kota Jakarta. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta yakni menangani berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah Jakarta terkait pelayanan publik melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Penulis memandang bahwa tulisan karya ilmiah tentang **Implementasi Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dalam Mewujudkan *Smart City* di Unit Pelaksana Teknis Jakarta *Smart City*** ini menarik untuk ditulis. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui sejauh mana pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam Kebijakan Jakarta *Smart City* melalui aplikasinya Jakarta Kini (JAKI) dan ingin mengetahui apakah sistem pelayanan berbasis digital ini merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta. Sehingga tujuan dari penelitian ini ingin mendeskripsikan mengenai implementasi program aplikasi JAKI dalam meningkatkan *smart city* di Unit Pelaksana Teknis Jakarta *Smart City*.

METODE

Berdasarkan tujuan penelitian ini, peneliti menganggap bahwa jenis penelitian yang relevan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan sumber data berupa data primer yang dapat dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dengan orang-orang yang terlibat dan memiliki pengetahuan tentang Aplikasi JAKI serta observasi di UPT Jakarta *Smart City*. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa peneliti memperoleh

sumber data berupa data sekunder, yang mana diperoleh melalui bukti catatan, dokumentasi resmi lainnya yang tersusun dalam arsip mengenai program aplikasi JAKI.

Sementara untuk lokus penelitian, yang dapat didefinisikan sebagai tempat dimana persoalan penelitian terjadi dan akan diambil datanya. Maka penelitian ini berlokasi di wilayah provinsi DKI Jakarta, tepatnya di UPT Jakarta *Smart City* yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan kav 8-9, Gedung Balaikota Blok G Lt. 13.

Fokus penelitian sebagai pembatas terhadap objek penelitian yang diangkat agar informasi yang dikumpulkan tidak keluar dari topik pembahasan dan dapat memudahkan peneliti dalam mengolah informasi dari data yang diperoleh. Maka dari itu, fokus pada penelitian ini mengacu pada teori model implementasi oleh Meter dan Horn (1975) bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Informan penelitian adalah individu atau instansi yang dianggap memiliki data yang berhubungan dengan pokok penelitian. Informan yang dianggap penulis berkaitan dengan topik penelitian, yaitu Mba Yenni selaku staf Tata Usaha Administrasi dan Keuangan, Mba Yasmin selaku staf Divisi Komunikasi (*Content Strategist*), Mba Putri selaku staf Divisi Pengembangan dan Analisa Produk (*Product Analyst*), Mas Daniel selaku Manajer Divisi Produk dan Layanan, serta masyarakat DKI Jakarta yang merasakan langsung program menggunakan aplikasi JAKI. Adapun penelitian ini mengacu pada Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

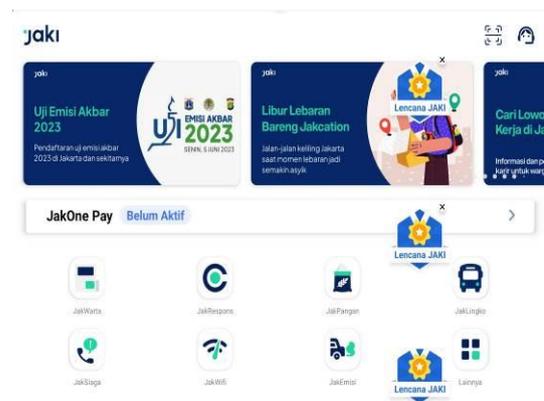
HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pelaksana Teknis Jakarta *Smart City* yakni salah satu Badan Layanan Umum Daerah dibawah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Unit Pelaksana Teknis Jakarta *Smart City* berpartisipasi dalam bidang administrasi publik di wilayah DKI Jakarta dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah dan mengatasi berbagai masalah kota dan penduduk dengan efektif.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, UPT Jakarta *Smart City* telah diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. UPT

Jakarta *Smart City* berupaya memodifikasi sistem pelayanan publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tradisional menjadi modern dengan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Jakarta Kini yang selanjutnya disingkat menjadi JAKI, merupakan aplikasi dengan beragam akses layanan dan informasi resmi pemerintah DKI Jakarta. Berbasis kota pintar, JAKI dikembangkan oleh UPT Jakarta *Smart City* melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi. JAKI bertujuan guna agar masyarakat bisa mendapatkan informasi resmi seputar Jakarta langsung dari BLUD dan OPD.



Gambar 2. Tampilan Awal JAKI
(Sumber: Dokumentasi peneliti 2023)

Program aplikasi JAKI mulai diselenggarakan oleh UPT Jakarta *Smart City* sebagai pengelola urusan pelayanan publik dengan transformasi digital. Aplikasi JAKI dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu metode penerapan kota pintar atau *Smart City* didasari pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang tertuang pada peraturan Presiden No 18 tahun 2020-2024, dan Intruksi Gubernur DKI Jakarta No 28 tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan transformasi digital.

JAKI merupakan aplikasi ini terintegrasi yang menyediakan beberapa fitur pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Jakarta. Fitur-fitur disediakan di aplikasi tersebut direfleksikan sebagai *citizen-design services* dengan bergabung fitur layanan yang dibuat oleh otoritas publik dan masyarakat, seperti *startup*. Adapun fitur-fitur utama yang dalam aplikasi JAKI ini, yaitu: Jakarta Tanggap Covid-19; Layanan Pemprov DKI Jakarta; JakLapor; JakWarta; JakPangan; JakLingko; JakSurvei; JakISPU; JakEmisi; JakPenda; JakResponses; JakWIFI; JakPantau; JakPeta; JakSiaga. Aplikasi ini juga digunakan untuk membantu daerah setempat dalam mengatasi permasalahan warganya

melalui sistem pelaporan kepada pihak terkait secara efektif dan cepat.

Berangkat pada penjelasan diatas, diperoleh fokus penelitian ini terkait pada seputar implementasi program aplikasi JAKI dalam mewujudkan *Smart city*. Fokus penelitian ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam variabel yakni dari ukuran dan tujuan Kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Adapun penejelasan dari keenam varaibel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Adapun tujuan dari aplikasi JAKI untuk memudahkan dalam mengakses informasi resmi dan mengintegrasikan layanan publik di DKI Jakarta. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk mengunduh aplikasi lain saat ingin mengakses layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi tersebut sesuai dengan pernyataan dari Putri selaku staf pengembangan dan analisa produk, berikut pernyataan beliau:

“Jadi aplikasi JAKI ini tujuannya agar pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Jadi aplikasi JAKI ini merupakan super apps yang dikembangkan oleh Pemprov DKI yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dan informasi resmi dari berbagai dinas di Jakarta. Jadi tujuannya lebih ke mempermudah pengaksesan seluruh pelayanan publik yang ada di aplikasi JAKI karena terintegrasi dengan layanan-layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.” (Wawancara 13 Desember 2022)

Tujuan dari implementasi aplikasi JAKI dalam mewujudkan Jakarta *Smart City* atau kota pintar dapat tercapai apabila terdapat usaha dilakukan oleh orang-orang pelaksana kebijakan. Ukuran keberhasilan dari implementasi program aplikasi JAKI dalam mewujudkan Jakarta *Smart City* adalah dengan melihat aksesibilitas dari masyarakat dan kemudahan dalam penggunaannya. Informasi tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Putri, sebagai berikut pernyataan beliau:

“Keberhasilan program aplikasi JAKI itu sendiri dilihat dari aksesibilitasnya. Seperti seberapa akses yang digunakan oleh masyarakat, selanjutnya yang kedua kemudahan penggunaannya seperti apa, dan yang ketiga integrasi fitur layanan dasarnya

baik atau tidak.” (Wawancara 13 Desember 2022)

Dari hasil wawancara dengan para pelaksana program tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengurusan pelayanan publik melalui aplikasi JAKI yang menjadi ukuran keberhasilan program bisa dilihat dari kemudahan masyarakat dalam mengakses program tersebut dan masyarakat tersebut bisa mengajak masyarakat lainnya agar partisipatif menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini yaitu bagaimana agar aplikasi JAKI bisa familiar di masyarakat dan dapat bersaing pada kualitas pelayanan dengan aplikasi-aplikasi lain. Akan tetapi, pihak implementor menghadapi tantangan tersebut dengan mengaktifkan kanal-kanal komunikasi melalui sosial media yang menjadi wujud strategi dalam mengkomunikasikan dan mempromosikan fitur JAKI dengan lebih efektif agar masyarakat dapat tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut.

2. Sumberdaya

Implementasi Kebijakan membutuhkan adanya sumberdaya. Dalam keseluruhan proses implementasi memerlukan adanya sumberdaya yang berkualitas untuk mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan. Selain sumber daya manusia, ada juga sumberdaya lain yang harus dipertimbangkan, khususnya sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

a) Sumber daya manusia

Kompetensi pelaksana mampu mempengaruhi implementasi suatu program. Begitu pula dengan pelaksanaan program JAKI di UPT Jakarta *Smart City* yang melibatkan seluruh pegawai yang turut memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan program. Jumlah pegawai UPT Jakarta *Smart City* terdiri dari 178 pegawai dengan jenjang pendidikan rata-rata S-1 dan S-2. Keahlian mereka juga sudah sesuai pada kebutuhan di UPT Jakarta *Smart City* sehingga mereka dapat bekerja dengan baik sesuai tanggungjawab dan kompetensi mereka masing-masing.

Tabel 1. Riwayat Pendidikan Terakhir pegawai di UPT Jakarta Smart City

No	Riwayat Pendidikan	Jumlah
1	S-1	158
2	S-2	20
Jumlah		178

Sumber: UPT Jakarta Smart City 2022

Selanjutnya para pegawai yang dibutuhkan dipastikan memiliki kemampuan dan kompetensi yang dapat menunjang pekerjaan tersebut, sehingga pegawai dapat melaksanakan dengan baik tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Informasi tersebut didukung oleh pernyataan Yenni, berikut pernyataannya:

“Jadi, misal yang kita buka adalah lowongan untuk tim komunikasi. Berarti kan mayoritas pasti kan jurusan komunikasi atau lulusan desain komunikasi yang dibutuhkan sama tim komunikasi tersebut. Kalau di in-front misalkan jurusan yang berkaitan dengan infrastuktur atau tentang bagaimana membantu tim OPL (*One Point Lessons*) dalam hal misalnya jaringannya. Jadi rekrutmen jurusan itu tergantung dari jabatan yang dibutuhkan. Dan semua itu minimal harus S-1 dan sudah ditentukan seperti itu.” (Wawancara 3 Januari 2022).

Berikut data jumlah pegawai di UPT Jakarta *Smart City*:

Tabel 2. Jumlah pegawai UPT JSC di setiap divisi

No	Divisi	Jumlah Pegawai
1	Analisa Data, Pengembangan, Analisa Produk	32
2	Komunikasi dan Pemasaran	25
3	Pengelolaan Respon dan Opini Publik	30
4	Pengembangan Sistem	73
5	Pengembangan Infrastruktur	13
6	Pengembangan dan Pengelolaan Kolaborasi	5
Jumlah		178

(Sumber: UPT Jakarta *Smart City*, 2022)

Dengan kompetensi yang terqualifikasi sesuai, maka dapat meminimalisir hambatan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan program aplikasi JAKI dalam mewujudkan *Smart City*. Oleh karena itu, para pegawai diberikan pelatihan yang dapat menambah potensi pegawai dalam melakukan pekerjaannya.

Dari informasi yang diperoleh dari hasil wawancara oleh staf UPT Jakarta *Smart City* maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki sumberdaya yang terdapat pada UPT Jakarta *Smart City* memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan program aplikasi

JAKI terutama dalam mewujudkan *Smart City* di wilayah Jakarta. Latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai juga memiliki peranan dalam pelaksanaan program aplikasi JAKI yang berbasis teknologi dan membutuhkan pegawai dalam hal komputerisasi. Dalam meningkatkan semua kompetensi pegawai, maka UPT Jakarta *Smart City* melaksanakan pelatihan bagi seluruh pegawainya dalam kegiatan workshop atau BIMTEK.

b) Sumber daya finansial

Selanjutnya salah satu indikator sumberdaya yang menjadi penentu keberhasilan program sumberdaya finansial atau dana anggaran. Anggaran yang digunakan oleh UPT Jakarta *Smart City* dalam implementasi aplikasi JAKI berasal dari APBD (Anggaran Belanja Pemerintah Daerah) Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan program dibutuhkan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit, hal tersebut dikarenakan program yang dijalankan berupa sistem digital yang memerlukan pengembangan terhadap sistem untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Selain untuk pengembangan sistem, dana anggaran juga digunakan untuk pemenuhan fasilitas penunjang program aplikasi JAKI, seperti komputer, media monitoring, pendukung pembuatan konten seperti kamera, dan fasilitas penunjang lainnya.

c) Sumber daya waktu

Selanjutnya indikator sumberdaya yang terakhir yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program yaitu sumberdaya waktu. Kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan atau program akan terjadi jika sumber daya manusia dan finansial digunakan dengan baik, tetapi sumber daya waktu kurang diperhatikan.

Dalam implementasi program aplikasi JAKI di UPT Jakarta *Smart City*, sumberdaya waktu menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, disesuaikan dengan SOP yang berlaku di setiap fitur pada aplikasi JAKI. Para implementor telah cukup memahami SOP itu sendiri melalui sosialisasi atau *sharing* kepada pihak terkait. Apabila implementasi program dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, maka pelaksanaan program yang dijalankan dapat berjalan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksanaan program dapat dipengaruhi oleh struktur birokrasi, standar, dan pola hubungan dalam

kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana. Hal tersebut karena kriteria yang sesuai dan cocok bagi agen pelaksana dapat mempengaruhi kinerja implementasi suatu program. Agustino (2008: 143) mengungkapkan bahwa organisasi formal dan informal yang akan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan akan menjadi fokus perhatian agen pelaksana. Dalam hal ini, karakteristik agen pelaksana yaitu pegawai Unit Pengelola Teknis Jakarta *Smart City* yang sudah cukup memahami SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dan memahami program yang dijalankan. Berkaitan dengan itu, setiap divisi pada UPT Jakarta *Smart City* memiliki wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan pengembangan aplikasi JAKI.

UPT JSC memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya. Hal tersebut telah diatur oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 144 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun ini adalah jenis kewenangan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan program aplikasi JAKI dalam mewujudkan *Smart City*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masyarakat juga merasakan perubahan pada pelayanan publik mejadi lebih mudah dan lebih baik untuk kepentingan melayani masyarakat dibandingkan dengan pelayanan publik yang diterapkan sebelumnya.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi mempengaruhi implementasi yang berjalan dapat efektif, sehingga merupakan salah satu faktor keberhasilan program. Apabila para implementor dapat memahami tujuan dari program atau Kebijakan. Van Horn dan Van Meter (1975) menjelaskan bahwa semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin kecil kemungkinan kesalahan.

Sebagai langkah upaya memastikan keberhasilan program, instansi harus bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya pelaksana kebijakan. Apabila koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program berjalan baik, maka akan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, implementasi program aplikasi JAKI dalam mewujudkan *Smart City* di Unit Pelaksana Teknis Jakarta *Smart City* tidak bekerja sendiri, melainkan membutuhkan pihak organisasi atau instansi lain sebagai kolaborator dalam menjalankan program

tersebut. Berikut daftar pihak yang bekerjasama dengan fitur di aplikasi JAKI, diantaranya:

Tabel 3. Kerjasama Fitur Aplikasi JAKI dengan Organisasi atau Instansi Terkait

No	Fitur	Kerjasama dengan Intansi/Organisasi
1	Jakarta Tanggap Covid-19	Dinas Kesehatan
2	Layanan Pemprov DKI Jakarta	Instansi Terkait
3	JakLapor	Kelurahan Terkait
4	JakWarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta
5	JakPangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
6	JakLingko	Dinas Perhubungan
7	JakSurvei	Up Statistik
8	JakEmisi	World Resources Institute (WRI) Indonesia
9	JakISPU	Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,
10	JakPenda	Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta
11	JakRespons	Jakarta <i>Smart City</i>
12	JakWiFi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta
13	JakPantau	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sumber Daya Air
14	JakPeta	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta
15	JakSiaga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta

(Sumber: UPT Jakarta Smart City, 2022)

Komunikasi atau koordinasi yang dilakukan kepada eksternal UPT Jakarta *Smart City* biasanya dilakukan melalui kanal komunikasi, seperti *WhatsApp* atau melakukan pertemuan bersama dengan pihak kolaborator. Sedangkan dalam komunikasi antar pegawai internal UPT Jakarta *Smart City* dapat dilakukan dengan komunikasi sehari-hari saja yang dapat dilakukan di kantor secara langsung ataupun melalui platform komunikasi digital.

Selain itu, UPT Jakarta *Smart City* juga mengadakan kegiatan sosialisasi program layanan aplikasi JAKI kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di media seperti berita atau press release, konten video yang dibagikan di media sosial seperti video *youtube*, twitter, ataupun instagram. Selanjutnya UPT Jakarta *Smart City* juga melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan yang disosialisasikan di beberapa kelurahan atau sekolah di Jakarta.



**Gambar 3. Sosialisasi melalui JSC Goes to School
SMAN 35 Jakarta Pusat**

(Sumber: Instagram JSCLab 2023)

5. Disposisi Implementor

Disposisi implementor terkait dengan pemahaman implementor terhadap Kebijakan. Berbagai tanggapan implementor terhadap Kebijakan tersebut meliputi penolakan ataupun penerimaan yang mampu mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini, implementasi program aplikasi JAKI dipengaruhi oleh cara para implementor program bertindak. Dari sisi pemahaman implementor terhadap program ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai UPT JSC memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait program aplikasi JAKI.

Selanjutnya dari sisi tanggapan kebijakan baik penolakan atau penerimaan implementor terhadap suatu kebijakan menunjukkan bahwa mereka cakap dalam menjalankan tugasnya. Wewenang dan tugas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan berbasis digital dijalankan dengan baik. Seperti dalam upaya pengembangan program, UPT Jakarta *Smart City* perlu melakukan BIMTEK terlebih dahulu sebagai upaya dalam dilakukan dalam menunjang kompetensi pegawai.

Dalam hal kendala yang dialami sistem error atau bug, maka pihak yang bertanggungjawab dalam menangani hal tersebut juga segera menangani kendala tersebut. Informasi tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mas Daniel, berikut pernyataan beliau:

“Waktu itu pernah terjadi kendala bug atau error, tapi secara cepat langsung ditangani oleh tim developer kita.”
(Wawancara 3 Januari 2023)

Pemaparan diatas menjadi bukti bahwa pegawai UPT Jakarta *Smart City* sebagai implementor cukup sigap dalam menghadapi kendala yang terjadi. Sehingga pencapaian tujuan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat menjadi mudah untuk dicapai.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Indikator tambahan yang perlu diperhatikan saat menerapkan kebijakan publik yaitu terkait dengan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di sekitar suatu program tersebut dijalankan. Faktor-faktor yang cukup signifikan untuk diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan berdasarkan perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu seberapa jauh kondisi lingkungan eksternal mendorong keberhasilan suatu Kebijakan yang telah ditetapkan.

a) Lingkungan Sosial

Dalam implemmentasi program aplikasi JAKI lingkungan sosial masyarakat cukup mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi program tersebut. Permasalahan yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat terkait dengan kondisi sosial masyarakat DKI Jakarta yang beragam, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum melek teknologi yang dapat mengakibatkan masyarakat kurang memahami dan memanfaatkan program ini.

Masyarakat yang telah mengenal program ini secara tidak langsung telah mendukung dan antusias berpartisipasi dalam program tersebut.

Informasi tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan Rahman, yaitu:

“Hampir setiap hari menggunakan aplikasi JAKI, karena paling tidak suka melihat jalan berlubang di Jakarta.” (Wawancara 14 Januari 2023)

Hal senada disampaikan oleh Reynaldi, berikut pernyataan beliau:

“Saya merasa berpartisipasi dalam program tersebut karena memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi tersebut.” (Wawancara 16 Desember 2022)

Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Sabarno, berikut pernyataan beliau:

“Mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan JAKI bila terdapat penyampaian keluhan terkait aplikasi tersebut.” (Wawancara 25 Januari 2023)

Berdasarkan informasi tersebut, lingkungan sosial dari adanya implementasi aplikasi JAKI dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap warga Jakarta. Hal tersebut karena masyarakat menilai bahwa fitur yang terdapat di aplikasi JAKI memberikan manfaat untuk kebutuhan sehari-hari.

b) Lingkungan Ekonomi

Keberhasilan program juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Program itu sendiri akan gagal jika lingkungan ekonomi tidak mendukungnya. Pelaksanaan program aplikasi JAKI cukup memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Dari implementasi program aplikasi JAKI ini, wujudnya berupa ekonomi inklusif. Hal tersebut karena aplikasi JAKI telah menerapkan transformasi digital yang menjadi tantangan dalam penerapan digital ekonomi itu sendiri. Dalam hal ini yaitu fitur dari aplikasi JAKI yaitu e-wallet dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara digital dalam aplikasi JAKI. Sehingga dampaknya dapat memudahkan masyarakat dalam peningkatan APBD terkait dengan penertiban dalam pembayaran pajak.

c) Lingkungan Politik

Lingkungan politik dapat diartikan sebagai instansi pemerintah atau sisi birokrasi. Adanya birokrasi yakni mengatur semua aspek kehidupan rakyatnya. Sehingga pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ditujukan untuk mendesain ulang birokrasi yang ada di lingkungan pemerintah kearah lebih baik sesuai kondisi saat ini (Syafriyani dan Zaituna, 2018). Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi program aplikasi JAKI, kemudahan untuk mendapatkan layanan dan dapat mamangkas sisi birokrasi yang berbelit-belit merupakan upaya yang dilakukan sebagai perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat DKI Jakarta. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan Yasmin, berikut pernyataan beliau:

“Dari sisi birokrasi menjadi jauh lebih ringkas dan kemudahan dalam mendapatkan layanan. JAKI itu memang memangkas hal-hal yang bisa dilakukan dari rumah. Yang sebelumnya dilakukan langsung ke tempat-tempat atau kantor-kantor pemerintahan, salah satunya dari Jaklapor. Atau misalnya kita punya fitur antrian faskes, jadi tidak perlu antri subuh-subuh, bisa langsung mengambil nomor antrian di JAKI.”
(Wawancara 13 Desember 2022)

Selain itu, pembagian data fitur di aplikasi JAKI dengan dinas di wilayah DKI Jakarta dan pemberian dana yang berasal dari APBD menjadi wujud dukungan pemerintah. Selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

juga turut hadir dalam launching aplikasi JAKI dan memperkenalkan kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta. Berikut dokumentasi saat pemerintah DKI Jakarta hadir dalam launching aplikasi JAKI:



Gambar 4. Launching Aplikasi JAKI
(Sumber: Diskominfotik 2019)

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang membantu penelitian ini, diantaranya:

1. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi.
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si., selaku Ketua Dosen Penguji dalam seminar proposal dan siding skripsi.
3. Ibu Dra. Meirinawati, M.AP., selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal dan siding skripsi.
4. Segenap Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
5. Segenap pegawai Unit Pelaksana Teknis Jakarta *Smart City* yang telah bersedia membantu penulis dalam penelitian ini

PENUTUP

Simpulan

Dalam pelaksanaan program aplikasi JAKI dalam mewujudkan *Smart City* di kota Jakarta, jika dilihat pada variabel ukuran dan tujuan program menunjukkan bahwa program secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup optimal sesuai dengan pencapaian tujuan. Ukuran keberhasilan program juga dapat dilihat dengan kepuasan masyarakat yang mengakses aplikasi JAKI dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menggali informasi seputar Jakarta melalui satu aplikasi super, yaitu aplikasi JAKI.

Pada sisi sumberdaya finansial digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dalam memenuhi kebutuhan dalam pengembangan sistem dan pembelian perangkat seperti komputer atau monitor agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dana yang diperoleh berasal APBD DKI Jakarta. Selanjutnya dari sisi sumber daya waktu program aplikasi JAKI memungkinkan masyarakat

untuk menemukan informasi secara cepat dan mengurus urusan administrasi di wilayah Jakarta karena melalui *online*. Dan yang terakhir dari sisi sumberdaya manusia, UPT Jakarta *Smart City* merekrut pegawai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.

Dari sisi komunikasi antar organisasi menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam implementasi program aplikasi JAKI pihak UPT JSC merupakan pihak dengan tugas pada administratif serta teknis di dalam ruangan. Sehingga membutuhkan pihak yang bertugas dalam teknis di lapangan. Setiap fitur di aplikasi JAKI memiliki pihak yang berbeda dalam kerjasama pengembangan fitur tersebut. Koordinasi yang dilakukan dapat diadakan melalui pertemuan ataupun melalui *platform* pesan seperti *email* atau *Whatsapp*. Selain itu, pihak implementor juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar program yang dijalankan dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas.

Pogram aplikasi JAKI dalam mewujudkan *Smart City* di Jakarta dapat diimplementasikan dengan baik juga disebabkan adanya dukungan politik Pemprov DKI Jakarta yang turut serta mendukung implementasi program sebagai pengimplementasian dari Kebijakan yang dikeluarkan dalam hal pelayanan publik dengan transformasi digital. Dalam lingkungan sosial program ini mampu untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dan mengurus urusan administrasi secara *online* tanpa perlu mendatangi instansi tersebut. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, masyarakat dapat wujudnya berupa ekonomi inklusif.

Saran

Berdasarkan temuan yang telah diungkapkan terkait Implementasi Program Aplikasi JAKI dalam Mewujudkan *Smart City* di UPT Jakarta *Smart City*, peneliti telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan pada implementasi program agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi kedepannya.

1. Pada variabel komunikasi antar organisasi sudah cukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, dibutuhkan adanya jadwal pertemuan tetap dengan dinas terkait sehingga koordinasi yang dijalankan dapat bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. Pada variabel komunikasi antar organisasi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai program aplikasi JAKI perlu ditingkatkan. Sosialisasi tersebut terkait prosedur menggunakan beberapa fitur yang terdapat di aplikasi JAKI, agar masyarakat lebih memilih aplikasi JAKI dalam mempermudah urusan pelayanan dan mengakses informasi di DKI Jakarta.

3. Terkait dengan variabel sumberdaya, perlu adanya peningkatan kinerja server aplikasi oleh UPT Jakarta *Smart City*. Sehingga masyarakat yang mengakses tidak sering mengalami error atau bug saat ingin menggunakan aplikasi JAKI. Selain itu, UPT Jakarta *Smart City* perlu mengedukasi masyarakat apabila masyarakat mengalami kendala terkait program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aplikasi JAKI. <https://jaki.jakarta.go.id/> (*online*). Diakses pada 24 November 2022 sampai 29 Maret 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2021. *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2019-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta.
- Bănică, A., Eva, M., Corodescu-Roșca, E. M. A., Ibănescu, B. C., Opria, A. M., & Pascariu, G. C. 2020. *Towards smart (er) resilient cities. Evidences from Romanian urban areas*. *Geografie*, 125(4), 397–422.
- Cohen, Boyd. 2014. *The Smartest Cities in The World 2015*. <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>
- Ekdana, Moch. Rizky dan Tauran. 2022. *Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya*. *Publika*. Vol. 11, No. 1.
- Fanida, Eva Hany et al. 2021. *Implementation of Electronic Government Through the People's Service System in Sidoarjo (SIPRAJA) in Tambakrejo Village, Waru District, Sidoarjo Regency*. *Journal Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Vol. 603. 82-90.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. 2007. *Smart Cities Ranking of European Medium-Sized Cities (p. 11)*. Vienna, UT: Centre of Regional Science. http://www.smartcities.eu/download/city_ranking_final.pdf
- Intruksi Gubernur DKI Jakarta No 28 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital.
- Jakarta *Smart City*. <http://smartcity.jakarta.go.id/> (*online*). Diakses pada 5 September 2022 sampai 29 Maret 2023.
- Megawati, Suci dkk. 2022. *Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi E-Monografi Data Administrasi Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi*. *Community Development Journal*. Vol. 3, No. 3.

- Meter, Donald S. Van dan Horn, Carl E. Van. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society, Vol.6,4.
- Nurman, Ahmad. 2013. *Manajemen Perkotaan*. Jakarta: Tatamedia
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 144 Tahun 2019 Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*.
- Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Pratiwi, Nisa Atika. 2022. *Partisipasi Masyarakat Melalui Penerapan Aplikasi JAKI Pada Jakarta Smart City (Studi Kelurahan Jati Padang)*. Diploma Tesis: Universitas Nasional.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang tertuang pada peraturan Presiden No 18 tahun 2020-2024.
- Schaffers, Hans. 2010. *Smart Cities and the Future Internet: Towards Collaboration Models for Open and User Driven Innovation Ecosystems*, FIA Ghent, "Smart Cities and Future Internet Experimentation", December 16th 2010. Elsevier Ltd
- Sofiana, Analia. 2023. *Analisis Implementasi Open Governansi Melalui Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Pada Fitur Jak-Respon Dalam Penyebarluasan Informasi Publik*. Journal of Social Contemplativa. 1(1); 45-53.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiyani, Ida dan Zaituna, Y. Putri. 2018. *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi di BPKSDM Kabupaten Sumenep*. Journal of Public Sector Innovation. Vol. 3, No. 1.
- Widyaningsih, D. 2013. *Kota Surabaya Menuju Smart City*. Universitas Gadjah Mada.

